



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2015 - 2016.
Masa Persidangan ke-	: IV (empat).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Kementerian Pariwisata RI.
Hari/Tanggal	: Rabu, 13 April 2016.
Pukul	: 10.00 - Selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Ir. H.A.R Sutan Adil Hendra, M.M./ Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Persiapan dan Kesiapan dan Pelaksanaan APBN Tahun 2016; 2. Pengawasan Pelaksanaan Promosi Pemasaran Pariwisata Mancanegara Tahun 2015; 3. Rencana Pelaksanaan Promosi Pemasaran Pariwisata Mancanegara Tahun 2016; 4. Realisasi Target Wisatawan Mancanegara 5. Lain-Lain.
Hadir	: 31 orang dari 54 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Menteri Pariwisata RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 11.25 WIB oleh Ir. H.A.R Sutan Adil Hendra, M.M./Wakil Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Pariwisata RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. PERSIAPAN DAN KESIAPAN PELAKSANAAN APBN TAHUN 2016

1. Terhadap persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN tahun 2016, Komisi X DPR RI mengingatkan Kemenpar RI agar pelaksanaan APBN tahun 2016 tidak sekadar mengejar daya serap, tetapi pemanfaatan anggaran harus benar-benar dapat meningkatkan kontribusi pada PDB Nasional, penerimaan devisa, peningkatan jumlah tenaga kerja, indeks

- daya saing pariwisata, dan berdampak langsung terhadap masyarakat dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
2. Terhadap realisasi komitmen anggaran per 11 April 2016 mencapai 64,6% sementara realisasi pembayaran baru mencapai 4%, Komisi X DPR RI mengingatkan Kemenpar RI untuk mengantisipasi dan menyiapkan langkah strategis bilamana dalam RAPBN Perubahan tahun 2016 terjadi pengurangan belanja K/L.
 3. Dalam rangka pengembangan destinasi dan industri pariwisata yang antara lain percepatan pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas, Komisi X DPR RI meminta Kemenpar RI untuk menyiapkan payung hukum (regulasi) yang antara lain mengatur tentang penyiapan SDM dan infrastruktur kepariwisataan agar program Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau program Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat sejalan, selaras, dan seirama.

B. PELAKSANAAN PROMOSI PEMASARAN PARIWISATA MANCANEGARA NEGARA TAHUN 2015

Komisi X DPR RI memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan promosi pemasaran pariwisata mancanegara tahun 2015 yang telah mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari banyak pihak. Untuk selanjutnya, Komisi X DPR RI mendorong Kemenpar RI untuk lebih mengoptimalkan promosi pemasaran pariwisata mancanegara tahun 2016 karena anggarannya meningkat hampir 300% dibandingkan dengan tahun 2015.

C. RENCANA PELAKSANAAN PROMOSI PEMASARAN PARIWISATA MANCANEGARA TAHUN 2016 DAN REALISASI TARGET WISATAWAN MANCANEGARA TAHUN 2015

1. Mengingat anggaran untuk pemasaran pariwisata mancanegara tahun 2016 sebesar Rp2,955T atau mengalami kenaikan hampir 300% dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar Rp1T, Komisi X DPR RI mendesak Kemenpar RI untuk:
 - a. Mengevaluasi target kunjungan wisman untuk tahun 2016 lebih dari 12 juta.
 - b. Lebih agresif dan lebih fokus dalam mempromosikan pemasaran pariwisata Indonesia.
 - c. Memperkuat destinasi wisata sejarah, wisata religi, dan desa wisata, penyiapan standar infrastruktur yang lebih aman dan nyaman, meningkatkan kualifikasi, sertifikasi, dan kompetensi SDM pariwisata.
 - d. Mengoptimalkan pelaksanaan promosi pemasaran pariwisata mancanegara dengan menyusun strategi dan kebijakan promosi, destinasi, dan SDM harus paralel.
 - e. Mengkaji peningkatan penerimaan devisa.
 - f. Mengkaji kebijakan bebas visa untuk 169 negara terhadap dampak positif dan negatif perkembangan pariwisata Indonesia, peningkatan pertumbuhan wisman, peningkatan kontribusi PDB Nasional, peningkatan jumlah tenaga kerja, peningkatan indeks daya saing pariwisata, manfaat ekonomi bagi Indonesia, dan dampak langsung terhadap masyarakat.

- g. Menyampaikan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan promosi pemasaran pariwisata mancanegara.
2. Komisi X DPR masih memerlukan pendalaman mengenai pendefinisian, pengklasifikasian, dan penetapan ruang lingkup wisman, untuk itu Komisi X DPR RI akan membentuk Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata.

III. PENUTUP

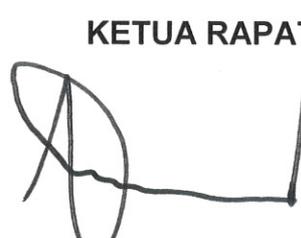
Rapat ditutup pada pukul **16.00** WIB

MENTERI PARIWISATA RI,



ARIEF YAHYA

KETUA RAPAT,



IR. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M.